

[Hoax] Orang yang Sudah Divaksin Dapat Menularkan Penyakit Reproduksi

25 April 2021 | 42 Kali | Edy Krisna



Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Instagram sebuah video berdurasi 35.44 menit berisi informasi bahwa orang yang sudah divaksin Covid-19 dapat menularkan penyakit reproduksi kepada yang belum divaksin. Dalam unggahan video itu juga disebutkan, terjadi lonjakan kasus keguguran dan pendarahan pasca menopause karena pasien tersebut berada di dekat orang yang sudah divaksin.

Berdasarkan penelusuran Kumparan.com, klaim yang beredar tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Dikutip dari Reuters, perwakilan dari American College of Obstetricians and Gynecologists, Christopher Zahn menyatakan, unggahan semacam itu merupakan konspirasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan kepercayaan seseorang terhadap vaksin Corona. Dikutip dari situs Satgas Covid-19, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesi?k terhadap virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut.

[Hoax] Surat Pendataan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Tahun 2021 Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

25 April 2021 | 43 Kali | Edy Krisna



Penjelasan :

Telah beredar sebuah Surat Pendataan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Tahun 2021 yang disebut berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Seluruh Indonesia, pada isi suratnya dituliskan bahwa pihak penyelenggara pendidikan wajib menyampaikan data dan informasi tenaga pengajar seperti Identitas perguruan tinggi, struktur organisasi dan biodata pengajar serta dikirimkan melalui e-mail yang tercantum pada surat tersebut.

Faktanya, surat tersebut adalah palsu dan bukan resmi dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh media sosial resmi milik Dirjen Pendidikan Tinggi bahwa surat tersebut hoaks dan berisikan informasi yang tidak benar.

[Disinformasi] Ketua DPRD Kabupaten Mimika Meninggal Akibat Vaksin

25 April 2021 | 52 Kali | Edy Krisna

Penjelasan :

Beredar sebuah informasi pada grup media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Robby K Omaleng meninggal dunia karena vaksin. Pada keterangan disebutkan bahwa Ketua DPRD Mimika mengalami serangan jantung setelah dua hari mendapatkan vaksin. Dalam unggahan tersebut juga memuat sebuah video yang diklaim merupakan sosok Ketua DPRD Mimika yang sedang mendapatkan vaksin.

Melansir dari laman seputarpapua.com, Ketua DPRD Kabupaten Mimika, yakni Robby K Omaleng sebelumnya Kamis 22 April 2021 pukul 09.00 dikabarkan sempat melakukan kunjungan ke wilayah PT PAL, Jalan Trans Nabire, usai melakukan kunjungan Robby K Omaleng dibawa ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) untuk diberikan penanganan lebih lanjut setelah merasakan kesakitan pada bagian dada. Namun setelah dilakukan penanganan selama 30 menit, Robby K Omaleng dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosa serangan jantung. Pimpinan Pelayanan Medis RSMM, yakni dr. Nina mengatakan bahwa almarhum tiba di rumah sakit dengan kondisi syok serangan jantung dan tingkat kesadaran menurun.

[Disinformasi] Gubernur NTB Tidak Melarang Mudik Lebaran 1442 H

25 April 2021 | 53 Kali | Edy Krisna



Penjelasan :

Beredar sebuah informasi berupa selebaran yang menyebutkan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkie Nizar tidak melarang mudik lebaran 1442 H.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa Gubernur NTB tidak melarang mudik lebaran secara keseluruhan, adalah keliru. Faktanya, Zulkie Nizar selaku Gubernur NTB menjelaskan maksud pernyataannya tersebut. Zulkie Nizar meluruskan pernyataan tersebut adalah terkait mudik lokal di NTB. Dalam hal ini, Zul menilai tidak perlu ada pembatasan berlebihan terkait praktik mudik lokal warga yang masih berada di seputar NTB dengan mengedepankan protokol kesehatan. Adapun penjelasan yang dikutip dari republika.co.id, Zulkie Nizar menegaskan bahwa kebijakan larangan mudik tetap mengikuti ketentuan pusat. Ia mengatakan tidak mungkin kebijakan di Daerah berbeda dengan kebijakan Pemerintah Pusat.